

KEHADIRAN OMBUDSMAN HARUS BERDAMPAK PADA PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK

Rabu, 26 Februari 2020 - Gosanna Oktavia Harianja

Realitakyat.com - Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai, menyerahkan laporan kinerja lembaganya tahun 2019 ke DPR. Laporan tersebut, diterima langsung Ketua DPR RI, Puan Maharani, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Penyerahan laporan kinerja tersebut, merupakan suatu kewajiban bagi Ombudsman RI sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin yang turut mendampingi Puan, mengatakan bahwa kehadiran Ombudsman RI harus berdampak pada perbaikan pelayanan publik.

"Ombudsman didirikan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah baik pusat maupun daerah," katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2020)

Menurut Azis, agar kinerja Ombudsman dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, Ombudsman harus memiliki target dalam melaksanakan tugasnya mengawasi kementerian dan lembaga negara tanpa mengabaikan laporan masyarakat.

"Ombudsman mengawasi semua kementerian dan lembaga. Kami berharap, ke depan Ombudsman memiliki target apa yang akan diperbaiki terlebih dahulu. Daripada banyak tapi tidak mendalam, lebih fokus memperbaiki apa, ada targetnya, namun tidak mengabaikan laporan masyarakat," katanya.

Terkait anggaran yang dinilai kecil, Azis mengayakan akan memperjuangkan peningkatan anggaran agar kinerja Ombudsman lebih efektif dan efisien. Selain itu, pihaknya juga berharap agar instansi penyelenggara pelayanan publik menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Ombudsman, sehingga keberadaannya dirasakan manfaatnya.

Di samping menyerahkan laporan kepada Ketua DPR RI, Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai menyampaikan bahwasanya Ombudsman membutuhkan dukungan dari DPR RI dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pengawas, salah satunya adalah melalui dukungan anggaran.

"Dalam pertemuan tadi juga disampaikan bahwa Ombudsman perlu dukungan ketika menyampaikan laporan kepada institusi. Jika ada dukungan dari DPR RI, saya rasa pengawasan terhadap pelayanan publik akan lebih efektif. Termasuk juga soal anggaran. Bagaimana fungsi pengawasan bisa efektif jika anggaran Ombudsman tidak memadai," katanya. (ndi).